

Memahami Pengelolaan Dana Desa Melalui Perspektif Dinamika Aktor di Desa Muara Inu

Muhamad Sijali ^{1*}; Taufik Arbain ²

^{1,2} Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia ; msijali76@gmail.com ; datuktaufikarbain@gmail.com.

* Correspondence : msijali76@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan Dana Desa sekarang ini menjadi permasalahan bagi beberapa daerah di Indonesia, baik terkait soal akuntabilitas, transparansi, lemahnya sumberdaya pengelola termasuk soal kuatnya intervensi banyak aktor yang justru melemahkan pengelolaan yang mengarah pada nihilnya harapan adanya *good governance*. Fakta demikian juga berlaku di Desa Muara Inu Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, dimana adanya kepemimpinan dan eksternal aspek pengawasan sebagai faktor determinan buruknya pengelolaan dana desa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika aktor pengelolaan dana desa, dengan menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada sumber data yang berjumlah 7 orang serta data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan informasi pendukung lainnya. Temuan data dianalisis secara eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika aktor Pengelolaan Dana Desa di Desa Muara Inu terkait dengan dinamika aktor dalam pengelolaan dana desa ini yang memfokuskan pada aspek (a) intervensi para aktor desa dalam pengelolaan dana desa, (b) melihat komunikasi, koordinasi dan interaksi antar aktor dan (c) terkait partisipasi para aktor dalam pengelolaan dana desa. Untuk itu riset ini menyarankan agar melakukan penguatan kapasitas *building* Pemerintah Desa dari aspek sumberdaya yang berpengaruh pada komunikasi dan koordinasi, menghindari intervensi negatif dan meningkatkan partisipasi serta interaksi diantaranya dalam pembinaan dan pengawasan.

Kata kunci : *Pengelolaan, Dana Desa, Intervensi, Komunikasi dan Koordinasi, Partisipasi dan Interaksi.*

ABSTRACT

Village Fund management is currently a problem for several regions in Indonesia, both related to issues of accountability, transparency, weak management resources, including the strong intervention of many actors which actually includes management which leads to zero hope for good governance. This fact also occurs in Muara Inu Village, Lahei District, North Barito Regency, where leadership and external aspects of supervision are determining factors for poor management of village funds. The aim of this research is to analyze the dynamics of village fund management actors, using qualitative methods. The data collection method is through in-depth interviews with 7 data sources as well as secondary data collected through literature studies and other supporting information. Data findings are explained explanatory. The results of the research show that the dynamics of actors in managing village funds in Muara Inu Village are related to the dynamics of actors in managing village funds which focuses on aspects (a) intervention of village actors in managing village funds, (b) looking at communication, coordination and interaction between actors and (c) participation of relevant actors in managing village funds. For this reason, this research suggests strengthening the capacity of Village Government buildings from the aspect of resources that influence communication and coordination, avoiding negative interventions and increasing participation and interaction, including in training and supervision.

Keywords : *Management, Village Fund, Intervention, Communication and Coordination, Participation and Interaction*

Pendahuluan

Penelitian ini beranjak dari menyruaknya isu pengelolaan Dana Desa di berbagai daerah di Indonesia cenderung tidak terbuka dan tidak akuntabel. Tidak akuntabilitas ini terjadi diduga adanya kepentingan kekuasaan, monopoli kegiatan, dan ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan peruntukan. Hal ini terjadi pada penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Muara Inu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara yang beberapa hal permasalahan itu terkait penyalahgunaan Dana Desa bidang Pembangunan Infrastruktur Desa berupa Perahu Motor *Emergency* dan Tambatan Perahu.

Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki berbagai macam bidang pembangunan pada sektor publik. Beberapa hal yang terkait dengan pembangunan yakni melaksanakan pembangunan nasional maupun daerah yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan baik pada pusat, provinsi, maupun daerah. Hulu *et al.*, (2018) menyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan nasional berdasarkan visi dan misi pemerintah di Indonesia yang di dalamnya terkandung pemerataan pembangunan yang berguna untuk suatu kepentingan masyarakat luas.

Salah satu hal yang terpenting dalam suatu pembangunan dan proses penyelenggaraan pemerintah tentunya tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan peraturan tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2001 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018, pemerintah mendukung gerakan pembangunan Desa agar Desa bisa menjadi subyek.

Pembangunan sejatinya merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan cara cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik dalam kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Pembangunan sejatinya juga harus dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu keamanan, kebebasan, kesejahteraan dan kehidupan budaya dengan mengadopsi nilai inklusif, setara, dan adil untuk semua kelompok, terutama memastikan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok minoritas terlibat dalam proses pembangunan. Pembangunan adalah upaya meningkatkan kualitas hidup manusia (Syamsi, 2018).

Pembangunan yang ada di wilayah Indonesia tidak hanya terjadi di kota- kota besar sesuai dengan konsep "Nawacita" yang bertujuan membangun dari pinggiran. Pembangunan ini tentunya juga terjadi pada salah satu Provinsi yakni Provinsi Kalimantan Tengah. Toun (2018) menyatakan bahwa wilayah Kalimantan Tengah memiliki karakteristik seperti dimaksudkan dalam berbagai produk kebijakan tersebut, yakni wilayah daratan yang luas dan sebagian besar masih berupa hutan, wilayah perairan yang terdiri dari wilayah sungai dan laut serta wilayah udara di atasnya. Sebagai sebuah kesatuan wilayah, langkah pertama dalam penataan ruang dan wilayah adalah melakukan analisis dan identifikasi terhadap berbagai karakteristik dari ruang dan wilayah tersebut. Hal tersebut untuk menjamin sebuah kawasan yang arah pembangunannya tetap berorientasi lingkungan, penataan yang konstruktif dan terencana hingga analisis perkembangan wilayah untuk jangka panjang khususnya daerah pedesaan.

Desa merupakan pemerintahan terkecil yang langsung berdampingan dan melayani masyarakat Indonesia serta tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Suharyono (2020) juga menyatakan umumnya wilayah Desa berkaitan erat dengan proses pembangunan. Pembangunan merupakan hal yang penting di pedesaan yang terlihat dari cara pemerintah mengatur, mengelola, serta mengalokasikan keuangannya untuk berbagai macam kepentingan. Menurut Lengkong & Tasik (2018), sejak dimulainya program Dana Desa, pemerintah dan masyarakat mengutarakan begitu banyak harapan yang di antaranya adalah untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat serta untuk membangun infrastruktur.

Posisi Desa dalam pembangunan tidak lagi sebatas objek, melainkan menjadi subjek pelaksana program pembangunan dari Pemerintah. Desa menjadi penyelenggara pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat secara penuh serta mandiri. Pitono & Kartiwi (2016) menyatakan bahwa pemerintahan Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Memperkuat Desa secara total merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dan dihindari dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kemandirian Desa dan kesejahteraan masyarakat sebagai kerangka tujuan otonomi daerah secara mendasar pada masing-masing daerah.

Menurut Yusuf (2021) permasalahan yang terbukti dengan banyaknya kasus penyimpangan yang menyebabkan program Dana Desa menjadi tidak efektif. Presiden Joko Widodo menyebutkan terdapat 900 Kepala Desa di Indonesia tersangkut kasus penyalangunaan anggaran Dana Desa pada tahun 2017. Modus penyimpangan Dana Desa, yaitu pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, *mark up* anggaran yang tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah Desa, penyelewengan Dana Desa untuk kepentingan pribadi, dan lemahnya pengawasan serta penggelapan honor aparat Desa. Permasalahan inilah yang menimbulkan berbagai macam kasus yang menyebabkan berbagai pihak sampai pada kasus pidana tidak terkecuali di Desa Muara Inu, dimana penggunaan Dana Desa terjadi penyalahgunaan pada tahun anggaran 2018.

Penelitian-penelitian yakni oleh Arbain & Ariyani (2019, Handriono *et al.*, (2023), Partini (2018), Suharyono (2020), Yusuf (2021) yang menyatakan berbagai permasalahan pada penggunaan Dana Desa. Permasalahan serupa tersebut terjadi di salah satu Desa di Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara. Desa yang dimaksud ialah Desa Muara Inu yang terkait dengan penyalahgunaan Dana Desa bidang pembangunan di Desa Muara Inu. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan (wawancara internal) dengan perangkat Desa tentang permasalahan Dana Desa yang terjadi, menunjukkan bahwa adanya penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Muara Inu terhadap pembangunan infrastruktur Desa yaitu perahu Motor Emergency dan Tambatan Perahu di Desa Muara Inu.. Permasalahan ini tentunya penyimpangan dari teori paradigma administrasi yakni NPM (*New Public Management*) yang berkaitan dengan NPG, teori Aktor dan berpengaruh pada *Good Governance* yang menekankan manajemen prinsip yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi serta Aktornya. Hal tersebut tentunya berpengaruh sehingga membuat kasus tersebut bertentangan dengan teori aktor dan teori NPM (*New Public Management*) dimana sebagai dasarnya ialah teori POAC yang dicetuskan oleh George R. Terry (1958) dalam bukunya *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan).

Penyimpangan terhadap inti dari teori tersebut dimana kondisi tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian guna mengetahui penyebab dan melakukan evaluasi terhadap berbagai kinerja aparatur Desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi ini merupakan hal yang perlu dibenahi bagi pemerintah Desa terutama aparatur Desa. Hal ini guna untuk memberikan solusi dan evaluasi di kemudian hari, sehingga perlu adanya peningkatan integritas aparat Desa agar tidak tergoda melihat dana yang besar untuk melakukan korupsi sehingga Dana Desa dapat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan.

Berdasarkan Pengelolaan Dana Desa yang banyak menimbulkan kasus, perlu adanya penelitian tentang penyebab, solusi serta evaluasi yang diberikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan Pengelolaan Dana Desa bidang pembangunan infrastruktur yaitu perahu *motor emergency* dan tambatan perahu di Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara dengan melihat aspek dinamika aktor dan manajemen Dana Desa. Artinya penelitian ini diharapkan menjadi tonggak untuk setiap aktor yang nantinya ikut serta dalam pemerintahan Desa dapat bekerja dengan hati-hati dalam penggunaan Dana Desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif yang diarahkan pada pengumpulan data yang lebih banyak bergantung kepada peneliti sendiri sebagai pengumpul data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Informan penelitian yakni perangkat Desa, BPD, Pemerintah Kecamatan, Kabid Dinsos PMD, dan Auditor Inspektorat. Analisis data Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif sesuai jumlah variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini dan didukung dengan data sekunder yakni melalui reduksi data, kompleksitas data dan pengolahan data.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada informan berupa wawancara terhadap Perangkat Desa Muara Inu (Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan serta Kaur Keuangan), BPD Muara Inu (Ketua), Pemerintah Kecamatan Lahei (Camat), Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara (Kabid Pembinaan, Pemerintahan Lembaga Desa Kelurahan dan BPD), dan Inspektorat Kabupaten Barito Utara (Auditor Ahli Muda) terdapat urgensi penelitian yang didapatkan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan dapat dilihat bahwa perlu adanya pembahasan mendalam terhadap beberapa aspek instrumen seperti intervensi, komunikasi dan koordinasi, serta partisipasi dan interaksi. Wawancara tersebut menyatakan bahwa dalam penganggaran, pelaksanaan/penggunaan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa Muara Inu terbukti adanya intervensi. Intervensi dalam hal ini dinyatakan oleh beberapa informan yakni adanya tindakan campur tangan terhadap suatu anggaran yang berakibat terhadap suatu permasalahan yang terjadi di antara dua pihak atau beberapa pihak sekaligus. Adanya intervensi ini berpengaruh pada penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban laporan dari anggaran Desa Muara Inu tahun anggaran 2018. Berikut hasil rekap wawancara pada 7 responden tersaji pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil rekap wawancara informan penelitian.

No.	Pertanyaan penelitian	Tanggapan		Jumlah Informan	Perlu adanya pembahasan mendalam (Cukup perlu/perlu/sangat perlu)
		Ya	Tidak		
Aspirasi dan Intervensi					
1	Apakah dalam musyawarah desa terkait perencanaan Kepala Desa Muara Inu menyerap aspirasi masyarakat?	✓		7 (Perangkat Desa 3, BPD 1, Camat 1. Kabid 1, Inspektorat 1)	Cukup perlu
2	Apakah dalam musyawarah desa terkait perencanaan adanya intervensi dari Kepala Desa Muara Inu?		✓	7 (Perangkat Desa 3, BPD 1, Camat 1. Kabid 1, Inspektorat 1)	Perlu
3	Apakah dalam penganggaran adanya intervensi dari Kepala Desa Muara Inu?	✓		7 (Perangkat Desa 3, BPD 1, Camat 1. Kabid 1, Inspektorat 1)	Sangat perlu
4	Apakah dalam pelaksanaan/penggunaan anggaran adanya intervensi dari Kepala Desa Muara Inu?	✓		7 (Perangkat Desa 3, BPD 1, Camat 1. Kabid 1, Inspektorat 1)	Sangat perlu
5	Apakah dalam penatausahaan adanya intervensi dari Kepala Desa Muara Inu?	✓		7 (Perangkat Desa 3, BPD 1, Camat 1. Kabid 1, Inspektorat 1)	Sangat perlu
6	Apakah dalam pelaporan dan pertanggungjawaban ada intervensi dari Kepala Desa Muara Inu?	✓		7 (Perangkat Desa 3, BPD 1, Camat 1. Kabid 1, Inspektorat 1)	Sangat perlu
Partisipasi dan Interaksi					
1	Apakah ada partisipasi dan interaksi dari pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam membina dan mengawasi jalannya pemerintahan Kepala Desa Muara Inu	✓		7 (Perangkat Desa 3, BPD 1, Camat 1. Kabid 1, Inspektorat 1)	Perlu
2	Apakah ada partisipasi dan interaksi dari pemerintah Kecamatan Lahei dalam membina dan mengawasi jalannya pemerintahan Kepala Desa Muara Inu?	✓		7 (Perangkat Desa 3, BPD 1, Camat 1. Kabid 1, Inspektorat 1)	Perlu

3	Apakah ada partisipasi dan interaksi dari BPD Desa Muara Inu mengawasi jalannya pemerintahan Kepala Desa Muara Inu?	✓		7 (Perangkat Desa 3, BPD 1, Camat 1. Kabid 1, Inspektorat 1)	Perlu
Jaringan, Komunikasi, dan Koordinasi					
1	Apakah komunikasi dan koordinasi Kepala Desa Muara		✓	7 (Perangkat Desa 3, BPD 1,	Sangat perlu

Berdasarkan temuan hasil penelitian pada tabel 1 dan hasil wawancara yang telah dilakukan, ada beberapa penyebab yang muncul yakni kecenderungan tidak transparan dan akuntabel pengelolaan Dana Desa dalam hal ini oleh Kepala Desa Muara Inu yang berakibat adanya intervensi, miskomunikasi dan miskoordinasi antar aktor, serta lemahnya partisipasi dan interaksi terutama pada aktor desa pada aktor BPD, Kecamatan, dan Kabupaten, kemudian belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap aktor pemerintah Desa, dimana hal ini memang sudah berjalan pada pengelolaannya namun belum maksimal pada aktornya, dan terakhir minimnya kompetensi pemerintah Desa yang mengakibatkan seorang kepala Desa melakukan hal tersebut tanpa rasa takut akan peraturan perundangan yang berlaku.

Temuan hasil penelitian tersebut merupakan masalah yang diduga terjadi *miss management* Dana Muara Inu. Beberapa pandangan publik mengatakan hal ini didasarkan pada perbandingan dengan desa-desa lain yang jauh lebih progres, akuntabel, transparan, dan program sesuai dengan harapan masyarakat, tepat waktu, partisipatif serta minim konflik. Hal ini juga berkaitan dengan adanya intervensi bagi pengelolaan Dana Desa di Desa Muara Inu yang tentunya berkaitan dengan teori NPM (*New Public Management*). Kondisi ini merupakan bentuk penyimpangan Dana Desa baik oleh aktornya sendiri maupun dari pengelolaan kebijakannya. Berikut penjelasan tentang adanya intervensi dalam pengelolaan Dana Desa (penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) oleh Kepala Desa Muara Inu serta adanya, miskomunikasi dan miskoordinasi, serta lemahnya partisipasi dan interaksi antara Kepala Desa Muara Inu dengan perangkat Desa Muara Inu, BPD Muara Inu, Pemerintah Kecamatan Lahei, dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Dinsos PMD dan Inspektorat).

1. Intervensi Negatif

Intervensi berkaitan dengan melencengnya suatu teori atau kebijakan dalam sektor publik, beberapa penelitian tentang teori yang berkaitan dengan intervensi seperti penelitian Kusuma (2013) menyatakan bahwa *New Public Management* yang merupakan teori manajemen beranggapan bawa praktik pemerintahan untuk menjadi lebih baik maka perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen seperti adanya proses organisasi yang baik, proses pelaksanaannya, hingga teknik pengawasan yang dilakukan. Pada penelitian ini aktor yang merupakan kepala Desa langsung mencampur tangani pengelolaan Dana Desa nya, dengan artian bahwa dalam musyawarah sudah dinyatakan bahwa ingin membuat perahu motor emergency dan tambatan perahu untuk masyarakat Desa Muara Inu. Sarana- prasarana Desa seperti ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang berada di Desa Muara Inu langsung untuk bisa merasakan, dimana masyarakat bisa

menggunakannya untuk kepentingan darurat ataupun personal sendiri. akan tetapi, proses penganggaran dan pertanggungjawabannya dalam pembuatan inilah yang melenceng dari yang seharusnya. Fakta di lapangan Kepala Desa sudah melakukan hal secara personal dan mencampur tangani urusan Dana Desa tentunya bertentangan dengan Teori Norman Long (1992). Menurut Fakhriza (2017) yang menyatakan bahwa dalam pembuatan kebijakan seharusnya adanya interaksi antar aktor (dalam hal ini kepala Desa dan perangkat Desa harus dilakukan setara, *intensive*, dan *interface*). Kondisi ini seharusnya berlangsung dalam pemerintahan Desa Muara Inu.

2. Miskomunikasi dan Miss-koordinasi

Adanya miskomunikasi dan miskoordinasi juga berpengaruh pada pengelolaan Dana Desa dan aktor desanya sendiri. Seperti yang sudah disebutkan tentang kelebihan dana pada pembahasan intervensi di atas yang merupakan salah satu *mark up* dalam pengelolaan dana desa Muara Inu, sehingga saat penganggaran dan hasil yang dibayarkan untuk pengolahan perahu motor *emergency* dan tambatan perahu ini tidak sesuai, yang mengakibatkan selisih atau kelebihannya lah yang diambil oleh kepala Desa. Komunikasi berkaitan erat dengan relasi dimana jika komunikasi berjalan dengan baik maka relasi atau jaringan pun memberikan timbal balik yang baik pula. Sebaliknya, apabila dalam suatu pemerintahan seperti pemerintahan desa tidak menjalankan komunikasi dengan baik dengan pihak Perangkat Desa Muara Inu serta pengawas seperti BPD Muara Inu,

Pemerintah Kecamatan Lahei dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, maka dapat dipastikan jaringan atau relasi tidak berjalan dengan baik pula. Seperti yang dinyatakan Abdullah (2013) bahwa jaringan dan relasi tidak hanya terbatas pada yang bersifat horizontal, tapi juga yang bersifat vertikal hierarkhis, oleh karena itu semua bentuk jaringan dan relasi menjadi penting untuk diperluas sebagai upaya dinamis bagi komunitas dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi.

Terakhir yakni tentang miskoordinasi yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam mengambil keputusan. Keputusan ataupun pertanggungjawaban suatu yang penting wajib dilakukan koordinasi agar hasilnya dapat diketahui oleh khalayak yang patut untuk mengetahui. Apabila dalam penelitian ini tidak menjalin koordinasi dengan baik antara Kepala Desa dengan perangkat Desa serta atasan seperti BPD, pihak kecamatan, dan kabupaten, diharapkan dengan adanya hal ini bisa lebih dilakukan pembinaan dan bimbingan kembali.

Miskomunikasi dan miskoordinasi antar aktor pada suatu pemerintahan yang dikemukakan Howlett & Ramesh (1995) dimana jejaring kebijakan merupakan suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisi antar aktor pemerintahan, masyarakat, termasuk individu. Selain itu, menurut Islamy (2021) suatu implementasi dalam pemerintahan menjadi tidak efektif bila hubungan yang ada diantara *agency* (aktor-aktor) yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut terjadi *defisit*. Artinya bahwa, jika dalam suatu pemerintahan komunikasi dan koordinasi tidak efektif, maka akan terjadi miskomunikasi dan miskoordinasi dalam implementasi kebijakan.

3. Lemahnya Partisipasi dan Interaksi

Pada temuan hasil penelitian juga menyatakan lemahnya partisipasi dan interaksi antar pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, hal ini juga berkaitan dengan pembenahan bagi pemerintah desa. Lemahnya partisipasi dan interaksi berkaitan dengan peran pemerintah dalam partisipasi dan interaksi dalam penyelenggaraan pemerintah dimana menurut Viney

(2006) dalam Arbain (2018) menyatakan bahwa partisipasi dan interaksi berkaitan dengan suatu pendekatan terhadap *stakeholder* dengan menyesuaikan kondisi seperti dengan rekan kerja/partner, melakukan konsultasi, informasi, serta melakukan kontrol. Hal ini berarti apabila pernyataan sebelumnya tidak berjalan dengan baik, dapat dipastikan bahwa partisipasi antar sesama dan interaksi antar sesama rekan kerja dalam instansi pemerintahan melemah

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang terjadinya dinamika aktor Pengelolaan Dana Desa di Desa Muara Inu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara dapat disimpulkan bahwa kasus ini menjadikan Kepala Desa sebagai aktor yang melakukan intervensi negatif terhadap pengelolaan Dana Desa karena kepala desa sebagai pemangku kepentingan yang erat kaitannya dengan kekuasaan yang dipegang untuk melakukan apa saja. Sebagaimana fakta hasil penelitian bahwa aktor Kepala Desa dalam hal ini telah melakukan intervensi negatif dalam Pengelolaan Dana Desa dari Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban terkait pembuatan perahu motor *emergency* dan tambatan perahu. Selain itu, adanya intervensi negatif ini disebabkan adanya miskomunikasi dan miskoordinasi antara Kepala Desa Muara Inu dengan perangkat Desa, BPD Muara Inu, Kecamatan Lahei dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan juga lemahnya pengawasan dan pembinaan terhadap Kepala Desa Muara Inu. Terakhir, tentang lemahnya partisipasi dan interaksi dimana partisipasi dan interaksi berkaitan dengan suatu pendekatan terhadap *stakeholder* dengan menyesuaikan kondisi seperti dengan rekan kerja/partner, melakukan konsultasi, informasi, serta melakukan kontrol. Hal ini berarti apabila pernyataan sebelumnya tidak berjalan dengan baik, dapat dipastikan bahwa partisipasi antar sesama dan interaksi antar sesama rekan kerja dalam instansi pemerintahan melemah.

Referensi

- Abdullah, S. (2013). Potensi dan kekuatan sosial dalam suatu komunitas. *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*, 15-21.
- Arbain, T. (2018). *Dinamika Relasi Aktor Dalam Kebijakan Kerjasama Daerah*. (Disertasi, Universitas Gadjah Mada).
- Arbain, T., Ariyani, E., & Aulia. (2018). Durian Runtuh, Mismanajemen dan Kuasa Sang Pambakal. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Fakhriza, N. Z. (2017). Perubahan Kebijakan Ritual Grebeg Suro di Kabupaten Ponorogo dalam Teori Orientasi Aktor. *Jurnal Politik Muda*, 6(3), 171-179.
- Handrino, S. I., Budhi, S., & Arbain, T. (2023). Village Fund Management In Community Empowerment In North Barito Regency. *International Journal Political, Law, and Social Science*, 4(1).
- Howlett, M. & Ramesh. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. New York: Oxford University Press.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154.
- Islamy, M.I. (2021). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusuma, M. I. Y., & Fuad, F. (2013). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

- Lengkong, V. P., & Tasik, H. H. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 5(1).
- Partini. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Diakses melalui <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>. Pada tanggal 27 Maret 2023.
- Pitono, A., & Kartiwi, K. (2016). Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Politikologi*, 27-37.
- Suharyono, S. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 648-651
- Syamsi, S. S. (2018). Nawa Cita Jokowi-JK dalam Paradigma Pembangunan Ekonomi. *SOIJST* Vol. 1 (1): 73-102.
- Toun, N. R. (2018). Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 1(01), 129-148.
- Yusuf, N. (2021). Efektivitas Program Dana Desa Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. *Journal of Public Power*, 5(1), 60-7.